

**TESIS**  
**MODEL FORMULASI KEBIJAKAN**  
**PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI**  
**DI KABUPATEN JOMBANG**



**YUDHA DEWANDRIANTO**  
**071143022**

**PROGRAM MAGISTER KEBIJAKAN PUBLIK**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**  
**SEMESTER GASAL 2014/2015**

**TESIS**  
**MODEL FORMULASI KEBIJAKAN**  
**PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI**  
**DI KABUPATEN JOMBANG**



YUDHA DEWANDRIANTO  
071143022

PROGRAM MAGISTER KEBIJAKAN PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
SEMESTER GASAL 2014/2015

**MODEL FORMULASI KEBIJAKAN  
PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI  
DI KABUPATEN JOMBANG**



**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Studi Kebijakan Publik  
Pada Program Magister Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Airlangga**

**Oleh :  
YUDHA DEWANDRIANTO  
071143022**

**PROGRAM MAGISTER KEBIJAKAN PUBLIK  
DEPARTEMEN ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**Lembar Persetujuan**

**PENULISAN TESIS INI  
TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 13 Januari 2015**

Oleh  
Pembimbing Ketua

**Prof. Dr. H. Jusuf Irianto, Drs. M.Com**  
NIP. 196505061993031003

Konsultan

**Erna Setijaningrum, S.IP., M.Si**  
NIP.197005032000032001

Mengetahui  
Ketua Program Studi

**Dr. Antun Mardiyanta, Drs. M.A**  
NIP 196110311988101001

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI PENULISAN TESIS

Telah diuji pada

Tanggal 21 Januari 2015

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua :

**Dr. Antun Mardiyanta, Drs., M.A.**  
**NIP. 19611031 198810 1 001**

Anggota : 1.

**Drs. Roestoto Hartojo Putro, SU**  
**NIP. 19530506 197903 1 003**

2.

**Prof. Dr. H. Jusuf Irianto, Drs. M.Com**  
**NIP. 19650506 199303 1 003**

3.

**Erna Setijaningrum, S.IP., M.Si**  
**NIP. 197005032000032001**

## **PERNYATAAN ORIGINALITAS**

Bagian atau keseluruhan isi penulisan tesis ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan/atau universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan/ditulis oleh individu selain penyusun kecuali bila dituliskan dengan format kutipan dalam isi Penulisan Tesis.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 13 Januari 2015

(Yudha Dewandrianto)



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur hanyalah milik Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Model Formulasi Kebijakan Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Jombang”. Tulisan yang dibuat dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai derajat kesarjanaan S-2 Magister Kebijakan Publik ini dilandasi oleh ketertarikan penulis terhadap proses formulasi kebijakan yang ada di daerah terutama dalam hal kebijakan Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi. Kompleksitas kepentingan para stakeholder sehubungan dengan Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi berpotensi mengakibatkan konflik yang merugikan sehingga harus ada upaya dari berbagai stakeholder agar dapat dirumuskan Model Formulasi Kebijakan dengan baik.

Atas terselesaikannya Tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah yang luar biasa.
2. Drs. I Basis Susilo MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya.
3. Dr. Antun Mardiyanta, Drs. MA, selaku Ketua Program Studi Magister Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya.
4. Prof. Dr. H. Jusuf Irianto, Drs. M. Com, selaku Dosen Pembimbing Utama atas segala perhatian, bimbingan dan dorongannya.
5. Erna Setijaningrum, S. IP., M. Si selaku Dosen Pembimbing/Konsultan yang telah memberikan saran serta perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

6. Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan kritik yang sangat dibutuhkan penulis dalam penyusunan tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen pada Program Magister Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya yang melalui kegiatan belajar-mengajar telah memberikan suatu dasar pemikiran analitis dan pengetahuan yang lebih baik.
3. Bapak, Ibu, Istri, serta anakku tercinta yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat serta dorongan sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di MKP – Unair.
8. Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, Khususnya Bapak Kepala Bagian Umum Kabupaten Jombang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan di MKP-Unair dan juga memberikan semangat serta dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di MKP-Unair.
9. Rekan-rekan kuliah dan teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas persahabatan dan kerjasama selama menjadi mahasiswa di MKP-Unair.

Hanya doa yang dapat penulis panjatkan semoga Allah S.W.T. membalas semua kebaikan Bapak, Ibu, teman-teman. Akhir kata, seiring harapan semoga tesis ini bermanfaat bagi yang menggunakannya.

Surabaya, 13 Januari 2015

Penulis

Yudha Dewandrianto

## RINGKASAN

Perkembangan penyelenggaraan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telepon seluler terlihat sangat signifikan pertumbuhannya. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan jumlah pelanggan/pemakai yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Mengikuti perkembangan jumlah pelanggan seluler terus meningkat, para penyelenggara jaringan bergerak seluler terus berusaha membangun infrastruktur agar wilayah pelayanan (*service coverage*) semakin luas, dan kualitas layanan menjadi meningkat pula. Salah satu infrastruktur penyelenggaraan jaringan bergerak seluler yang terus menerus dibangun adalah *Base Transceiver Station* (BTS).

Maraknya pembangunan menara BTS ini jika terus-menerus dibiarkan akan berdampak negatif bagi keseimbangan lingkungan. Ketidakcocokan diantaranya dapat dilihat dari berkurangnya aspek estetika kota dikarenakan seakan-akan menjadikan kota seperti hutan menara, ketidaksesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah disusun oleh pemerintah daerah setempat, pemborosan penggunaan ruang karena pada saat itu satu menara hanya digunakan oleh satu operator, hingga protes warga atas pembangunan menara di wilayah tempat tinggalnya dengan alasan yang beragam.

Mengantisipasi penambahan jumlah menara yang semakin cepat saat ini, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.2 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi dan Surat Keputusan Bersama/SKB Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal/ BKPM, tentang menara bersama. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan ruang.

Berbagai Perbedaan Persepsi masyarakat umum dalam menerjemahkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2013 Untuk Pedoman Pembangunan Dan Penataan Menara telekomunikasi yang tampaknya kurang sesuai dengan maksud dan tujuan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2013 secara jelas tercermin dalam peraturan dan tindakan Masyarakat menutup/ menyegel beberapa menara telekomunikasi sebelum tersedianya menara bersama dan sebelum berakhirnya masa transisi yang diberikan kepada operator telekomunikasi

Kebijakan publik merupakan fenomena yang kompleks dan dinamis. Dari perspektif manajemen, proses kebijakan dapat dipandang sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi paling tidak tiga kelompok utama, yaitu (1) formulasi kebijakan, (2) pelaksanaan kebijakan, dan (3) evaluasi kinerja kebijakan. Untuk itu faktor penentu dari sebuah tahapan formulasi kebijakan adalah siapa saja aktor yang terlibat dalam pembuatan atau perumusan kebijakan tersebut, kepentingan apa yang melatarbelakanginya, dan dengan bagaimana cara merumuskan kebijakan tersebut.

Dalam kebijakan Pedoman Pembangunan dan penataan menara telekomunikasi didalam PERDA No 2 Tahun 2013 ini kemudian peneliti

menangkap bahwa perumusan kebijakan Pedoman Pembangunan dan penataan menara telekomunikasi ini sesuai dengan model rasionalisme dimana dalam model rasionalisme ini dijelaskan para pembuat kebijakan Dimana model ini mengedepankan gagasan bahwa kebijakan publik sebagai *maximum social gain* berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang memberikan manfaat optimum bagi masyarakat.

Dalam kajian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah Jenis dan model penelitian deskriptif dan bersifat studi kasus yang dikaji secara kualitatif. Fokus dalam penelitian ini mengacu pada masalah dan tujuan penelitian yang telah ditentukan yaitu diantaranya Apakah Model Teori Rasionalisme dalam Formulasi kebijakan diterapkan dalam menentukan Kebijakan Pedoman Pembangunan Penataan Menara Telekomunikasi di Jombang dengan menggunakan analisis stakeholder, dan mendeskripsikan berbagai stakeholder yang mempengaruhi Formulasi kebijakan dalam menentukan Kebijakan Pedoman Pembangunan Penataan Menara Telekomunikasi di Jombang.

Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian Model yang digunakan adalah model teori Rasionalisme. Dimana model ini mengedepankan gagasan bahwa kebijakan publik penataan menara telekomunikasi sebagai *maximum social gain* berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang memberikan manfaat optimum bagi masyarakat dapat dipergunakan dalam hal ini. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dengan menggunakan dasar-dasar teori Analisis Stakeholder sebagai alat untuk menganalisa fakta dan informasi yang didapatkan, maka : Teridentifikasi empat aktor kunci dan kepentingannya dalam mempengaruhi penataan menara telekomunikasi, yaitu:

- a) Eksekutif, memiliki kepentingan menjalankan kebijakan yang populis untuk kepentingan menaikkan pendapatan asli daerah dari sektor penarikan retribusi pembangunan menara telekomunikasi.
- b) Masyarakat sekitar menara telekomunikasi, memiliki kepentingan agar tetap diilibatkan dalam proses perijinan HO/AMDAL dikarenakan nantinya masyarakat sekitar menara bisa mendapatkan benefit yang cukup besar dari penyewaan lahan dan *social cost* yang tinggi pula dari pihak provider menara telekomunikasi
- c) DPRD, memiliki kepentingan dalam menjembatani penyampaian usulan proses legislasi dari masyarakat yang dia wakili dengan pihak eksekutif dan pihak swasta/provider menara telekomunikasi
- d) Swasta/Provider menara telekomunikasi, memiliki kepentingan untuk memperluas area jangkauan sinyal telekomunikasi sehingga dapat mengurangi area *blind spot*.